 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2016
	Disahkan oleh	Camat..... Pangkat NIP.
KECAMATAN	Nama SOP	Prosedur Pelayanan Administrasi Perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame 2. Peraturan Bupati Malang No. 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame 3. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pelaksanaan perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame 2. Memahami tentang mekanisme pelayanan perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame 3. Memahami dasar penetapan Izin Penyelenggaraan Reklame
Keterkaitan	Peralatan/ perlengkapan
SOP Pengagendaan surat keluar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan 2. Standar Pelayanan Publik 3. Peralatan komputer pendukung perizinan
Peringatan	Pencatatan
Perizinan dapat diproses apabila berkas telah memenuhi syarat	




PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

KECAMATAN

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	2016
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2016
Disahkan oleh	Camat..... Pangkat NIP.
Nama SOP	Prosedur Pelayanan Administrasi Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 11 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang 7. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat	1. Memahami pelaksanaan perizinan Izin Mendirikan Bangunan 2. Memahami tentang mekanisme pelayanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan 3. Memahami dasar penetapan Izin Mendirikan Bangunan
Keterkaitan	Peralatan/ perlengkapan
SOP Pengagendaan surat keluar	1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan 2. Standar Pelayanan Publik 3. Peralatan komputer pendukung perizinan
Peringatan	Pencatatan
Perizinan dapat diproses apabila berkas telah memenuhi syarat	

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman
Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung

 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2016
	Disahkan oleh	Camat..... Pangkat NIP.
KECAMATAN	Nama SOP	Prosedur Pelayanan Administrasi Perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 18 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Perdagangan dan Industri Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami pelaksanaan perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan Memahami tentang mekanisme pelayanan perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Surat Izin Usaha Perdagangan
Keterkaitan	Peralatan/ perlengkapan
SOP Pengagendaan surat keluar	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan Standar Pelayanan Publik Peralatan komputer pendukung perizinan
Peringatan	Pencatatan
Perizinan dapat diproses apabila berkas telah memenuhi syarat	

Peraturan Bupati Malang No. 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

KECAMATAN

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	2016
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2016
Disahkan oleh	Camat..... Pangkat NIP.
Nama SOP	Prosedur Pelayanan Administrasi Perizinan Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 5. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 6. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pelaksanaan perizinan Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat 2. Memahami tentang mekanisme pelayanan perizinan Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat 3. Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat
Keterkaitan	Peralatan/ perlengkapan
SOP Pengagendaan surat keluar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan 2. Standar Pelayanan Publik 3. Peralatan komputer pendukung perizinan
Peringatan	Pencatatan
Perizinan dapat diproses apabila berkas telah memenuhi syarat	




PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

KECAMATAN

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	2016
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2016
Disahkan oleh	Camat..... Pangkat NIP.
Nama SOP	Prosedur Pelayanan Administrasi Perizinan Izin Pendirian Tempat Penitipan Anak


Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 6. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan; Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian 7. Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pelaksanaan perizinan Izin Pendirian Tempat Penitipan Anak 2. Memahami tentang mekanisme pelayanan perizinan Izin Pendirian Tempat Penitipan Anak 3. Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Izin Pendirian Tempat Penitipan Anak
Keterkaitan	Peralatan/ perlengkapan
SOP Pengagendaan surat keluar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan 2. Standar Pelayanan Publik 3. Peralatan komputer pendukung perizinan
Peringatan	Pencatatan
Perizinan dapat diproses apabila berkas telah memenuhi syarat	

 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2016
	Disahkan oleh	Camat..... Pangkat NIP.
KECAMATAN	Nama SOP	Prosedur Pelayanan Administrasi Perizinan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2009 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madarasah; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 5. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan; 6. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat 	<p>Memahami pelaksanaan perizinan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat 2. Memahami tentang mekanisme pelayanan perizinan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 3. ni dasar penetapan izin dan syarat-syarat Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar M
Keterkaitan	Peralatan/ perlengkapan
SOP Pengagendaan surat keluar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan 2. Standar Pelayanan Publik 3. Peralatan komputer pendukung perizinan
Peringatan	Pencatatan

Perizinan dapat diproses apabila berkas telah memenuhi syarat

--

 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2016
	Disahkan oleh	Camat..... Pangkat NIP.
KECAMATAN	Nama SOP	Prosedur Pelayanan Administrasi Perizinan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 5. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan; 6. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pelaksanaan perizinan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan 2. Memahami tentang mekanisme pelayanan perizinan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan 3. Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan
Keterkaitan	Peralatan/ perlengkapan
SOP Pengagendaan surat keluar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan 2. Standar Pelayanan Publik 3. Peralatan komputer pendukung perizinan
Peringatan	Pencatatan
Perizinan dapat diproses apabila berkas telah memenuhi syarat	



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

KECAMATAN

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	2016
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2016
Disahkan oleh	Camat.....

	Pangkat
	NIP.
Nama SOP	Prosedur Pelayanan Izin Tempat Parkir Insidentil

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengelolaan Tempat Parkir; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum. 4. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pelaksanaan perizinan Parkir Insidentil 2. Memahami tentang mekanisme pelayanan perizinan Parkir Insidentil 3. Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Izin Parkir Insidentil
Keterkaitan	Peralatan/ perlengkapan
SOP Pengagendaan surat keluar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan 2. Standar Pelayanan Publik 3. Peralatan komputer pendukung perizinan
Peringatan	Pencatatan
Perizinan dapat diproses apabila berkas telah memenuhi syarat	



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

KECAMATAN

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	2016
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2016
Disahkan oleh	Camat..... Pangkat NIP.
Nama SOP	Prosedur Pelayanan Tanda Daftar Nomor Induk Kelompok Kesenian

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 431/2080/024/1983 tanggal 24 Nopember 1983 tentang Petunjuk 2. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 3. 5. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan. 4. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pelaksanaan Tanda Daftar Nomor Induk Kelompok Kesenian 2. Memahami tentang mekanisme pelayanan Tanda Daftar Nomor Induk Kelompok Kesenian 3. Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Tanda Daftar Nomor Induk Kelompok Kesenian
Keterkaitan	Peralatan/ perlengkapan
SOP Pengagendaan surat keluar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan 2. Standar Pelayanan Publik 3. Peralatan komputer pendukung perizinan
Peringatan	Pencatatan
Perizinan dapat diproses apabila berkas telah memenuhi syarat	



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

KECAMATAN

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	2016
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2016
Disahkan oleh	Camat..... Pangkat NIP.
Nama SOP	Prosedur Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil5. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil2. Memahami tentang mekanisme pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil3. Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Izin Usaha Mikro dan Kecil
Keterkaitan	Peralatan/ perlengkapan
SOP Pengagendaan surat keluar	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan2. Standar Pelayanan Publik3. Peralatan komputer pendukung perizinan
Peringatan	Pencatatan
Perizinan dapat diproses apabila berkas telah memenuhi syarat	

Peraturan Bupati Malang No. 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

KECAMATAN

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	2016
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2016
Disahkan oleh	Camat..... Pangkat NIP.
Nama SOP	Prosedur Pelayanan Tanda Daftar Peternakan Rakyat

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 404/kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan; Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami pelaksanaan Tanda Daftar Peternakan Rakyat Memahami tentang mekanisme pelayanan Tanda Daftar Peternakan Rakyat Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Tanda Daftar Peternakan Rakyat
Keterkaitan	Peralatan/ perlengkapan
SOP Pengagendaaan surat keluar	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan Standar Pelayanan Publik Peralatan komputer pendukung perizinan
Peringatan	Pencatatan
Perizinan dapat diproses apabila berkas telah memenuhi syarat	